



WALI KOTA LUBUK LINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR **23** TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

15. Peraturan ...

15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 248 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan ...

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negaran Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 880) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah (Berita Negaran Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 482);

25. Peraturan ...

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 12);
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2022 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 Nomor 10);

29. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2023 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau, selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kota Lubuk Linggau.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Peraturan ...

7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau.
8. Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disingkat Perwal adalah Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

BAB II

PENDAPATAN DAERAH

Bagian Kesatu

Sumber Pendapatan

Pasal 4

Pendapatan daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 999.646.961.666,00 (Sembilan ratus sembilan puluh sembilan milyar enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Bagian Kedua
Pendapatan Asli Daerah
Pasal 5

Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebesar Rp. 153.826.451.576,00 (Seratus lima puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh enam juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pasal 6

Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sebesar Rp. 89.546.946.287,00 (Delapan puluh sembilan milyar lima ratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Hotel Rp. 3.356.179.698,00 (Tiga milyar tiga ratus lima puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- b. Pajak Restoran Rp. 9.504.000.000,00 (Sembilan milyar lima ratus empat juta rupiah);
- c. Pajak Hiburan Rp. 3.785.010.500,00 (Tiga milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta sepuluh ribu lima ratus rupiah);
- d. Pajak Reklame Rp. 4.105.056.089,00 (Empat milyar seratus lima juta lima puluh enam ribu delapan puluh sembilan rupiah);
- e. Pajak Penerangan Jalan Rp. 17.000.000.000,00 (Tujuh belas milyar rupiah);
- f. Pajak Parkir Rp. 1.400.000.000,00 (Satu milyar empat ratus juta rupiah);

g. Pajak ...

- g. Pajak Air Tanah Rp. 680.000.000,00 (Enam ratus delapan puluh juta rupiah);
- h. Pajak Sarang Burung Walet Rp. 680.000.000,00 (Enam ratus delapan puluh juta rupiah);
- i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp. 6.500.000.000,00 (Enam milyar lima ratus juta rupiah);
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Rp. 22.500.000.000,00 (Dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah); dan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Rp. 20.036.700.000,00 (Dua puluh milyar tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a Rp. 3.356.179.698,00 (Tiga milyar tiga ratus lima puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel Rp. 3.222.724.098,00 (Tiga milyar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan puluh delapan rupiah);
 - b. Pajak Motel Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);
 - c. Pajak Losmen Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
 - d. Pajak Pesanggrahan Rp. 11.991.900,00 (Sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);
 - e. Pajak Rumah Penginapan dan sejenisnya Rp. 20.983.900,00 (Dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah); dan
 - f. Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (sepuluh) Rp. 30.479.800,00 (Tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).

(2) Anggaran ...

- (2) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sebesar Rp. 9.504.000.000,00 (Sembilan milyar lima ratus empat juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Restoran dan Sejenisnya Rp. 6.844.000.000,00 (Enam milyar delapan ratus empat puluh empat juta rupiah);
 - b. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya Rp. 2.300.000.000,00 (Dua milyar tiga ratus juta rupiah);
 - c. Pajak Kafetaria dan Sejenisnya Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah);
 - d. Pajak Kantin dan Sejenisnya Rp. 35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah);
 - e. Pajak Warung dan Sejenisnya Rp. 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah); dan
 - f. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya Rp. 50.000.000 (Lima puluh lima juta rupiah).
- (3) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c sebesar Rp. 3.785.010.500,00 (Tiga milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta sepuluh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Tontonan Film Rp. 2.170.259.100,00 (Dua milyar seratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah);
 - b. Pajak Pagelaran Kesenian/Musi/Tari/Busana Rp. 20.245.100,00 (Dua puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah);
 - c. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya Rp. 889.506.300,00 (Delapan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus enam ribu tiga ratus rupiah);
 - d. Pajak Permainan Billiar dan Bowling Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
 - e. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan Rp. 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah); dan
 - f. Pajak ...

- f. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
- (4) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d sebesar Rp. 4.105.056.089,00 (Empat milyar seratus lima juta lima puluh enam ribu delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron Rp. 3.806.852.289,00 (Tiga milyar delapan ratus enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah);
 - b. Pajak Reklame Kain Rp. 172.364.300,00 (Seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
 - c. Pajak Reklame Melekat/Stiker Rp. 23.631.200,00 (Dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah);
 - d. Pajak Reklame Selebaran Rp. 62.104.000,00 (Enam puluh dua juta seratus empat ribu rupiah); dan
 - e. Pajak Reklame Berjalan Rp. 40.104.300,00 (Empat puluh juta seratus empat ribu tiga ratus rupiah).
- (5) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e sebesar Rp. 17.000.000.000,00 (Tujuh belas milyar rupiah), yang terdiri atas Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain Rp.17.000.000.000,00 (Tujuh belas milyar rupiah).
- (6) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (Satu milyar empat ratus juta rupiah), yang terdiri atas Pajak Parkir Rp. 1.400.000.000,00 (Satu milyar empat ratus juta rupiah).
- (7) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g sebesar Rp. 680.000.000,00 (Enam ratus delapan puluh juta rupiah), yang terdiri atas Pajak Air tanah Rp. 680.000.000,00 (Enam ratus delapan puluh juta rupiah).

(8) Anggaran ...

- (8) Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h sebesar Rp. 680.000.000,00 (Enam ratus delapan puluh juta rupiah), yang terdiri atas Pajak Sarang Burung Walet Rp. 680.000.000,00 (Enam ratus delapan puluh juta rupiah).
- (9) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i sebesar Rp. 6.500.000.000,00 (Enam milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Pasir dan Kerikil Rp. 1.779.071.100,00 (Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu seratus rupiah);
 - b. Pajak Tanah Liat Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah); dan
 - c. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan lainnya Rp. 4.670.928.900,00 (Empat milyar enam ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
- (10) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j sebesar Rp. 22.500.000.000,00 (Dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Rp. 22.500.000.000,00 (Dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (11) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k sebesar Rp. 20.036.700.000,00 (Dua puluh milyar tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-Pemindahan Hak Rp. 15.865.086.900,00 (Lima belas milyar delapan ratus enam puluh lima juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah); dan

b. Bea...

- b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-Pemberian Hak Baru Rp. 4.171.613.100,00 (Empat milyar seratus tujuh puluh satu juta enam ratus tiga belas ribu seratus rupiah).

Pasal 8

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sebesar Rp. 9.610.808.000,00 (Sembilan milyar enam ratus sepuluh juta delapan ratus delapan ribu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum Rp. 6.087.000.000,00 (Enam milyar delapan puluh tujuh juta rupiah);
- b. Retribusi Jasa Usaha Rp. 2.623.808.000,00 (Dua milyar enam ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu rupiah); dan
- c. Retribusi Perizinan tertentu Rp. 900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 9

(1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sebesar Rp. 6.087.000.000,00 (Enam milyar delapan puluh tujuh juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah);
- b. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Rp. 57.000.000,00 (Lima puluh tujuh juta rupiah);
- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp. 1.250.000.000,00 (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- d. Retribusi Pelayanan Pasar Rp. 1.250.000.000,00 (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- e. Retribusi ...

- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp. 1.200.000.000,00 (Satu milyar dua ratus juta rupiah);
 - f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah);
 - g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);
 - h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Rp. 700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah); dan
 - i. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Rp. 380.000.000,00 (Tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
- (2) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b sebesar Rp. 2.623.808.000,00 (Dua milyar enam ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp. 235.000.000,00 (Dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Rp. 1.230.000.000,00 (Satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah);
 - c. Retribusi Terminal Rp. 880.808.000,00 (Delapan ratus delapan puluh juta delapan ratus delapan ribu rupiah);
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan Rp. 260.000.000,00 (Dua ratus enam puluh juta rupiah); dan
 - e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp. 18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c sebesar Rp. 900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah), yang terdiri atas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rp. 900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 10

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sebesar Rp. 3.143.697.289,00 (Tiga milyar seratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Rp. 3.143.697.289,00 (Tiga milyar seratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 11

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d sebesar Rp. 51.525.000.000,00 (Lima puluh satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)
- b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah)
- c. Jasa Giro Rp. 700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah);
- d. Pendapatan Bunga Rp. 880.000.000,00 (Delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
- e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah);
- f. Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);
- g. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp. 450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta rupiah);
- h. Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp. 120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah);
- i. Pendapatan dari Pengembalian Rp. 430.000.000,00 (Empat ratus tiga puluh juta rupiah);
- j. Pendapatan ...

- j. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rp. 48.295.000.000,00 (Empat puluh delapan milyar dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah); dan
- k. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

Bagian Ketiga
Pendapatan Transfer
Pasal 12

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebesar Rp. 845.820.510.090,00 (Delapan ratus empat puluh lima milyar delapan ratus dua puluh juta lima ratus sepuluh ribu sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
- b. Pendapatan Transfer Daerah.

Pasal 13

(1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sebesar Rp. 736.762.928.342,00 (Tujuh ratus tiga puluh enam milyar tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah), terdiri atas:

- a. Dana transfer umum-Dana Bagi Hasil Rp. 125.214.541.060,00 (Seratus dua puluh lima milyar dua ratus empat belas juta lima ratus empat puluh satu ribu enam puluh rupiah);
- b. Dana transfer umum-Dana Alokasi Umum Rp. 488.476.297.282,00 (Empat ratus delapan puluh delapan milyar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);

c. Dana ...

- c. Dana transfer umum-Dana Alokasi Khusus Fisik Rp. 24.043.512.000,00 (Dua puluh empat milyar empat puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu rupiah);
 - d. Dana transfer umum-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rp. 99.028.578.000,00 (Sembilan puluh sembilan milyar dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah); dan
 - e. Dana Insentif Daerah Rp. 0,00 (Nol rupiah).
- (2) Pendapatan transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sebesar Rp. 109.057.581.748,00 (Seratus sembilan milyar lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rp. 109.057.581.748,00 (Seratus sembilan milyar lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah); dan
 - b. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Rp. 0,00 (Nol rupiah).

Bagian Keempat

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pasal 14

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).

BAB III

BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Belanja

Pasal 15

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 969.148.761.666,00 (Sembilan ratus enam puluh sembilan milyar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ...

ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan

Bagian Kedua
Belanja Operasional
Pasal 16

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a sebesar Rp. 779.638.405.581,00 (Tujuh ratus tujuh puluh sembilan milyar enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 446.482.116.732,00 (Empat ratus empat puluh enam milyar empat ratus delapan puluh dua juta seratus enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 274.898.897.249,00 (Dua ratus tujuh puluh empat milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 8.500.000.000,00 (Delapan milyar lima ratus juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 47.757.391.600,00 (Empat puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- (6) Belanja ...

- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah).

Bagian Ketiga

Belanja Modal

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b sebesar Rp. 187.010.356.085,00 (Seratus delapan puluh tujuh milyar sepuluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.070.647.200,00 (Satu milyar tujuh puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 13.452.732.042,00 (Tiga belas milyar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp. 437.581.750,00 (Empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp. 784.650.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

(6) Belanja ...

- (6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Rp. 135.192.000,00 (Seratus tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp. 7.054.247.392,00 (Tujuh milyar lima puluh empat jura dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Labotarium Sebesar Rp. 82.453.300,00 (Delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
- (9) Belanja Modal Komputer Sebesar Rp. 1.669.160.000,00 (Satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja Modal Alat Eksplorasi Sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemumian Rp. 517.800.000,00 (Lima ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu).
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp. 168.000.000,00 (Seratus enam puluh delapan juta rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Sebesar Rp. 1.547.499.600,00 (Satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- (14) Belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp. 25.667.306.400,00 (Dua puluh lima milyar enam ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam ribu empat ratus rupiah).
- (15) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp. 125.367.121.943,00 (Seratus dua puluh lima milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (16) Belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp. 21.340.111.200,00 (Dua puluh satu milyar tiga ratus empat puluh juta seratus sebelas ribu dua ratus rupiah).
- (17) Belanja ...

(17) Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi Sebesar Rp. 21.298.111.200,00 (Dua puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus sebelas ribu dua ratus rupiah).

(18) Belanja modal modal aset lainnya sebesar Rp. 112.437.300,00 (Seratus dua belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

Bagian Keempat
Belanja Tidak Terduga
Pasal 18

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Bagian Kelima
Belanja Transfer
Pasal 19

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah), yang terdiri atas belanja transfer.

BAB IV
PEMBIAYAAN DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Pembiayaan
Pasal 20

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Bagian ...

Bagian Kedua
Penerimaan Pembiayaan
Pasal 21

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sebesar Rp. 1.501.800.000,00 (Satu milyar lima ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.501.800.000,00 (Satu milyar lima ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Pengeluaran Pembiayaan
Pasal 22

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b sebesar Rp. 32.000.000.000,00 (Tiga puluh dua milyar rupiah), yang terdiri atas Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo (Rp. 32.000.000.000,00) (Tiga puluh dua milyar rupiah).

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 30.498.200.000,00 (Tiga puluh milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu Rupiah).

(2) Pembiayaan ...

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 30.498.200.000,00 (Tiga puluh milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu Rupiah)).

Pasal 24

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;

7. Lampiran ...

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemda, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Daftar Alokasi Anggaran Dana Kapitasi per FKTP;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Formulir Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Belanja Pengadaan Barang/Jasa Berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pasal 25

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, **29 DESEMBER 2023**

Pj. WALI KOTA LUBUK LINGGAU,



The seal is circular with a purple border. Inside, there is a central emblem featuring a Garuda bird with its wings spread, perched on a shield. The text 'WALIKOTA LUBUKLINGGAU' is written around the inner edge of the seal. A handwritten signature in black ink is written over the seal.

TRISKO DEERIANSYAH

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal,

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,



H. TAMRI

BERITA DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2023 NOMOR ...



KOTA LUBUK LINGGAU
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	153.826.451.576,00
4.1.01	Pajak Daerah	89.546.946.287,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	3.356.179.698,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	3.222.724.098,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	3.222.724.098,00
4.1.01.06.02	Pajak Motel	20.000.000,00
4.1.01.06.02.0001	Pajak Motel	20.000.000,00
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	50.000.000,00
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	50.000.000,00
4.1.01.06.06	Pajak Pesanggrahan	11.991.900,00
4.1.01.06.06.0001	Pajak Pesanggrahan	11.991.900,00
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	20.983.900,00
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	20.983.900,00
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	30.479.800,00
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	30.479.800,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	9.504.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	6.844.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	6.844.000.000,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.300.000.000,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.300.000.000,00
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	200.000.000,00
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	200.000.000,00
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	35.000.000,00
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	35.000.000,00
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	75.000.000,00
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	75.000.000,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	50.000.000,00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	50.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	3.785.010.500,00
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	2.170.259.100,00
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film	2.170.259.100,00
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	20.245.100,00
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	20.245.100,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	889.506.300,00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	889.506.300,00
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	5.000.000,00
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	5.000.000,00
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	600.000.000,00
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	600.000.000,00
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	100.000.000,00
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	100.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	4.105.056.089,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	3.806.852.289,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	3.806.852.289,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	172.364.300,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	172.364.300,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	23.631.200,00
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	23.631.200,00
4.1.01.09.04	Pajak Reklame Selebaran	62.104.000,00
4.1.01.09.04.0001	Pajak Reklame Selebaran	62.104.000,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	40.104.300,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	40.104.300,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	17.000.000.000,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	17.000.000.000,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	17.000.000.000,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	1.400.000.000,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	1.400.000.000,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	1.400.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	680.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	680.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	680.000.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	680.000.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	680.000.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	680.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.500.000.000,00
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	1.779.071.100,00
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	1.779.071.100,00
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	50.000.000,00
4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat	50.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	4.670.928.900,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	4.670.928.900,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	22.500.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	22.500.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	22.500.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	20.036.700.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	15.865.086.900,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	15.865.086.900,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	4.171.613.100,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	4.171.613.100,00
4.1.02	Retribusi Daerah	9.610.808.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	6.087.000.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.000.000.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.000.000.000,00
4.1.02.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	57.000.000,00
4.1.02.01.03.0001	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat	57.000.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.250.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.250.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	1.250.000.000,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	200.000.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	416.666.600,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	633.333.400,00
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.200.000.000,00
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.200.000.000,00
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	150.000.000,00
4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	150.000.000,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	100.000.000,00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	100.000.000,00
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	700.000.000,00
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	700.000.000,00
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	380.000.000,00
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	380.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.623.808.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	235.000.000,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	35.000.000,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	150.000.000,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	50.000.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.230.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1.230.000.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	880.808.000,00
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	880.808.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	260.000.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	260.000.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	18.000.000,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	18.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	900.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	900.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	900.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.143.697.289,00
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	3.143.697.289,00
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	3.143.697.289,00
4.1.03.01.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	3.143.697.289,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	51.525.000.000,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	50.000.000,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	50.000.000,00
4.1.04.01.02.0054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	50.000.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	250.000.000,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	250.000.000,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	250.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	700.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	600.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	600.000.000,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	100.000.000,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	100.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	880.000.000,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	880.000.000,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	880.000.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	150.000.000,00
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	50.000.000,00
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	50.000.000,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	100.000.000,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	100.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	100.000.000,00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	100.000.000,00
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	100.000.000,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	450.000.000,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	450.000.000,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	450.000.000,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	120.000.000,00
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	15.000.000,00
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	8.000.000,00
4.1.04.12.06.0002	Pendapatan Denda Pajak Motel	1.000.000,00
4.1.04.12.06.0003	Pendapatan Denda Pajak Losmen	1.000.000,00
4.1.04.12.06.0006	Pendapatan Denda Pajak Pesanggrahan	1.000.000,00
4.1.04.12.06.0007	Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	3.000.000,00
4.1.04.12.06.0008	Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	1.000.000,00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	17.000.000,00
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	10.000.000,00
4.1.04.12.07.0002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3.000.000,00
4.1.04.12.07.0003	Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	2.000.000,00
4.1.04.12.07.0004	Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya	1.000.000,00
4.1.04.12.07.0005	Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya	500.000,00
4.1.04.12.07.0007	Pendapatan Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	500.000,00
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	6.000.000,00
4.1.04.12.08.0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	3.000.000,00
4.1.04.12.08.0008	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	3.000.000,00
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	23.000.000,00
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	15.000.000,00
4.1.04.12.09.0002	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	6.000.000,00
4.1.04.12.09.0003	Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker	500.000,00
4.1.04.12.09.0004	Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran	500.000,00
4.1.04.12.09.0005	Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan	1.000.000,00
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	3.000.000,00
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	3.000.000,00
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	2.000.000,00
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	2.000.000,00
4.1.04.12.13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	1.000.000,00
4.1.04.12.13.0001	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	1.000.000,00
4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.12.14.0023	Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil	2.000.000,00
4.1.04.12.14.0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.000.000,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	50.000.000,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	50.000.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	430.000.000,00
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	230.000.000,00
4.1.04.15.04.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Tetap	230.000.000,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	200.000.000,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	200.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	48.295.000.000,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	48.295.000.000,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	48.295.000.000,00
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	100.000.000,00
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	100.000.000,00
4.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	100.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	845.820.510.090,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	736.762.928.342,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	736.762.928.342,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	125.214.541.060,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	16.931.047.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	9.301.532.000,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	400.000.000,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	8.000.000.000,00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	39.854.259.060,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	172.325.000,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	48.473.756.000,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	821.681.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.259.941.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	488.476.297.282,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	345.996.792.000,00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	14.400.000.000,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	54.146.751.000,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	35.421.954.000,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	38.510.800.282,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	24.043.512.000,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	550.304.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	5.253.071.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	5.949.278.000,00
4.2.01.01.03.0058	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	11.486.998.000,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	803.861.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	99.028.578.000,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	34.541.300.000,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.155.000.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	40.736.301.000,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.480.250.000,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	506.455.000,00
4.2.01.01.04.0019	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	6.203.286.000,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	427.800.000,00
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000,00
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	347.150.000,00
4.2.01.01.04.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	1.843.200.000,00
4.2.01.01.04.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	240.000.000,00
4.2.01.01.04.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	434.200.000,00
4.2.01.01.04.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	8.629.836.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	109.057.581.748,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	109.057.581.748,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	109.057.581.748,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	20.454.004.838,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	13.735.153.098,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	48.526.178.135,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	177.079.094,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	26.165.166.583,00
	Jumlah Pendapatan	999.646.961.666,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	779.638.405.581,00
5.1.01	Belanja Pegawai	446.482.116.732,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	320.453.372.961,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	243.053.117.186,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	229.053.117.186,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	14.000.000.000,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	20.496.849.998,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	19.416.219.657,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.080.630.341,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	9.735.469.096,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	9.735.469.096,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14.832.518.464,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14.832.518.464,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.050.775.854,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.214.428.289,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	836.347.565,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	14.644.675.474,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	13.806.249.863,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	838.425.611,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	278.239.369,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	178.239.369,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	100.000.000,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	11.727.520,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	11.519.159,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	208.361,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	11.000.000.000,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	10.000.000.000,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.000.000.000,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	800.000.000,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	450.000.000,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	350.000.000,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.550.000.000,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.140.000.000,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	410.000.000,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.000.000.000,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.000.000.000,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	47.513.444.440,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	44.499.139.820,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	44.499.139.820,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	2.850.447.956,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	2.850.447.956,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	163.856.664,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	163.856.664,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	47.028.950.531,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.555.770.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	121.000.000,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	217.800.000,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	84.700.000,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	133.705.000,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	435.600.000,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	29.645.000,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	8.575.000,00
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	8.575.000,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	96.800.000,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	59.370.000,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	360.000.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	431.919.531,00
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	139.709.400,00
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	233.692.000,00
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	18.018.131,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	8.000.000,00
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	32.500.000,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	39.095.725.000,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	39.095.725.000,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.640.576.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.640.576.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.304.960.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.831.140.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	465.660.000,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	8.160.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	15.373.271.930,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	671.790.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	671.790.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	175.450.000,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	175.450.000,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	130.794.500,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	130.794.500,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	67.179.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	67.179.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	103.042.800,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	103.042.800,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	47.684.700,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	47.684.700,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	945.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	945.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	353.173.930,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	353.173.930,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.361.551.500,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	100.000.000,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	10.000.000,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	11.551.500,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.240.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.341.600.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.341.600.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	421.910.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	421.910.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	568.368.870,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	39.019.149,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	39.019.149,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.318.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.318.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	59.140.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	59.140.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.041.640,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.041.640,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	505.663,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	505.663,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	114.418,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	114.418,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	10.000.000,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	10.000.000,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	444.230.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	36.300.000,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	60.500.000,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	21.175.000,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	39.930.000,00
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	133.705.000,00
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	7.865.000,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	3.025.000,00
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	3.025.000,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	27.830.000,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	6.000.000,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	104.875.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	551.600.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	350.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	350.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	14.993.108.000,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	14.993.108.000,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	14.993.108.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.898.897.249,00
5.1.02.01	Belanja Barang	59.138.350.446,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	51.674.602.446,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	79.729.218,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.534.789.316,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.733.311.050,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	214.484.500,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	52.941.875,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	91.100.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	958.022.000,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	416.252.033,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	390.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.537.239.896,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.420.450.328,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	215.180.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.481.143.070,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	574.866.950,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.323.946.243,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	35.577.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.317.750.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	434.309.290,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	14.120.000,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.292.692.383,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.156.672.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.458.117.106,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	202.654.988,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	460.812.700,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.975.709.500,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	756.000.000,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	2.709.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	962.995.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	406.122.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	328.150.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	204.000.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	501.009.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	429.750.000,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	33.000.000,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	21.250.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	76.400.000,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	33.600.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	133.000.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	800.656.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	890.450.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	113.250.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	18.750.000,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	18.750.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	7.444.998.000,00
5.1.02.01.04.0036	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	330.800.000,00
5.1.02.01.04.0710	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	7.114.198.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	82.761.982.233,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	65.653.417.633,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.399.600.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.419.750.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.304.800.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	800.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	15.600.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	173.225.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	434.500.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.551.380.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	95.000.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.760.400.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.576.000.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	364.800.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	156.750.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	4.236.400.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	7.825.050.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.366.570.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	7.077.000.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	4.541.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	866.700.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	247.150.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	67.080.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	431.200.000,00
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	21.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	42.130.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	178.494.200,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	1.498.950.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	75.559.450,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	151.501.057,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	16.414.586.426,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	291.722.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.962.382.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	34.750.000,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	43.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	593.587.500,00
5.1.02.02.01.0070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	5.000.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	430.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.411.532.000,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	588.000.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.803.468.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	20.064.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.973.379.600,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	15.000.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.416.100.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	91.298.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	611.100.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	387.016.600,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	187.500.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	52.365.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	154.000.000,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	49.000.000,00
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	10.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.215.543.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	434.693.000,00
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	21.700.000,00
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	92.650.000,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	9.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	657.500.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	11.000.000,00
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	3.000.000,00
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	8.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.781.000.000,00
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	290.000.000,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	100.000.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	850.000.000,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	1.100.000.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	241.000.000,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	100.000.000,00
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	100.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.005.000.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.005.000.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	81.200.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	81.200.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.619.910.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	637.500.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	962.410.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	20.000.000,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	10.000.000,00
5.1.02.02.15.0009	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	10.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	8.377.742.170,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.873.489.587,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.204.650.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	235.060.000,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	9.750.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	650.030.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	482.430.000,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	29.216.250,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	165.200.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	326.350.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	217.940.000,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	129.120.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	82.800.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	97.980.000,00
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	64.920.000,00
5.1.02.03.02.0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	73.650.000,00
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	104.393.337,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.362.717.583,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.362.717.583,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.141.535.000,00
5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	250.000.000,00
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	500.000.000,00
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	300.000.000,00
5.1.02.03.04.0052	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	91.535.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	56.532.278.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	56.532.278.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	48.293.448.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.605.950.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	604.680.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	28.200.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	765.852.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	751.202.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	600.327.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	14.875.000,00
5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	136.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.650.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	5.200.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	9.450.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	35.696.300.000,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	35.696.300.000,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	35.696.300.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	31.626.392.400,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	31.626.392.400,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	31.626.392.400,00
5.1.03	Belanja Bunga	8.500.000.000,00
5.1.03.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	8.500.000.000,00
5.1.03.03.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang	8.500.000.000,00
5.1.03.03.03.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang	8.500.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	47.757.391.600,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	40.200.000.000,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	40.000.000.000,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	40.000.000.000,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	200.000.000,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	200.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	4.497.400.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.297.400.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.297.400.000,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	50.000.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	50.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	50.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	50.000.000,00
5.1.05.05.05	Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	100.000.000,00
5.1.05.05.05.0001	Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	100.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	497.591.600,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	497.591.600,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	497.591.600,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	2.562.400.000,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	2.083.200.000,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	2.083.200.000,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	479.200.000,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	479.200.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.000.000.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.000.000.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	2.000.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.000.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	187.010.356.085,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.070.647.200,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	1.070.647.200,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	1.070.647.200,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	1.070.647.200,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.452.732.042,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.041.148.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.041.148.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.041.148.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	437.581.750,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	366.581.750,00
5.2.02.03.01.0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	351.181.750,00
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	15.400.000,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	62.000.000,00
5.2.02.03.02.0013	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	62.000.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	9.000.000,00
5.2.02.03.03.0004	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Klinis Lain	9.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	784.650.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	61.450.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	61.450.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	723.200.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	277.400.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	204.700.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20.000.000,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	221.100.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	135.192.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	126.192.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	96.192.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	30.000.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	9.000.000,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	9.000.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	7.054.247.392,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	406.640.000,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	406.640.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	6.647.607.392,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	6.647.607.392,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	82.453.300,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	82.453.300,00
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	40.200.000,00
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	42.253.300,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.669.160.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.290.000.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.290.000.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	379.160.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	379.160.000,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	15.000.000,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	15.000.000,00
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	15.000.000,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	517.800.000,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	517.800.000,00
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	517.800.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	168.000.000,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	168.000.000,00
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	168.000.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.547.499.600,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.547.499.600,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.547.499.600,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.667.306.400,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	24.232.505.400,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	24.232.505.400,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	21.382.781.400,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	2.205.080.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	644.644.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.324.801.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.324.801.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	1.300.000.000,00
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	24.801.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	110.000.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	110.000.000,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	110.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	125.367.121.943,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	101.144.070.879,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	86.142.269.560,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	82.742.270.360,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	3.399.999.200,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	15.001.801.319,00
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	15.001.801.319,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	21.477.526.064,00
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	17.051.360.000,00
5.2.04.02.02.0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	17.051.360.000,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	4.426.166.064,00
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	4.026.166.064,00
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	400.000.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	2.697.525.000,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	1.200.000.000,00
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	1.200.000.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	1.497.525.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	1.497.525.000,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	48.000.000,00
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	48.000.000,00
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	48.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21.340.111.200,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	42.000.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	42.000.000,00
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	42.000.000,00
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	21.298.111.200,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.05.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	21.298.111.200,00
5.2.05.07.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	21.298.111.200,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	112.437.300,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	112.437.300,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	112.437.300,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	12.537.300,00
5.2.06.01.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	99.900.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.500.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00
	Jumlah Belanja	969.148.761.666,00
	Total Surplus/(Defisit)	30.498.200.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.501.800.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.501.800.000,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	1.501.800.000,00
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	1.501.800.000,00
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	1.501.800.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	32.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	32.000.000.000,00
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	32.000.000.000,00
6.2.03.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang	32.000.000.000,00
6.2.03.03.03.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang	32.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	32.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	-30.498.200.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kota Lubuk Linggau, 29 Desember 2023

